

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini menjelaskan tentang upaya *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional dalam mengatasi kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang mengalami peningkatan di sektor pariwisata.¹ Dimana peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Mei 2017 naik 26,66% dibandingkan jumlah kunjungan pada Mei 2016 yaitu dari 915,21 ribu kunjungan menjadi 1,16 juta kunjungan.² Pariwisata menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi tidak hanya bagi perekonomian dunia tetapi juga kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat lokal.³ Menurut John M. Bryden (1973) dalam Abdurrachmat dan E. Maryani menyatakan bahwa:

*“Suatu penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan obyek wisata dapat memberikan setidaknya lima butir dampak positif, yaitu penyumbang devisa negara, menyebarkan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi melalui dampak penggandaan (multiplier effect), wawasan masyarakat tentang bangsa-bangsa di dunia semakin luas dan mendorong semakin meningkatnya pendidikan dan keterampilan penduduk”.*⁴

¹ Negara ASEAN dengan Industri Pariwisata Terbaik, RI Nomor Berapa, diakses pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2912835/negara-asean-dengan-industri-pariwisata-terbaik-ri-nomor-berapa>.

² Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Mei 2017 mencapai 1,16 Juta”. diakses pada <http://www.bps.go.id/brs/view/1320>

³ Sri Wahyuni Rasulong, “ASEAN Tourism Forum dan Peningkatan Pariwisata Indonesia”, Thailand dan Brunei”, (Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), 1.

⁴ Abdurrachmat dan E. Maryani. 1998. Dampak-dampak negatif pariwisata secara ekonomi. Diakses pada 10 Februari 2017

Kontribusi sektor pariwisata patut didorong perkembangannya dikarenakan dengan meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata di Indonesia, menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur.⁵ Kontribusi sektor pariwisata juga memberikan dampak positif lainnya yaitu meningkatnya PDB dari tahun 2010-2015. Semua itu dapat dilihat dari data BPS/Kementerian Pariwisata, tahun 2010 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 261,06 triliun menjadi 461,36 triliun rupiah, terhadap Devisa sebesar 7.603,45 juta dollar pada tahun 2010 menjadi 12.225,89 juta dollar pada tahun 2015 dan terhadap Tenaga Kerja sebesar 4 juta orang tahun 2010 menjadi 12,1 juta orang atau 10,6% dari total tenaga kerja nasional.⁶ Dalam skala global sektor pariwisata mampu mempertahankan pertumbuhannya, terhadap PDB 0,2%, Ekspor Dunia 2,3%, dan pertumbuhan jumlah wisatawan dunia mengalami kenaikan 0,4 Miliar.⁷

Namun, selain memiliki keuntungan bagi negara, sektor pariwisata juga patut diwaspadai. Hal ini dapat dilihat dari maraknya praktek-praktek transaksi seksual di daerah wisata yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak.⁸ Dalam prakteknya, sektor-sektor usaha terkait seperti biro perjalanan, penginapan, tempat-tempat hiburan lainnya secara langsung maupun tidak langsung memiliki

⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Tahun 2017 Kita Genjot Sektor Pariwisata” diakses dalam <http://setkab.go.id/tahun-2017-kita-genjot-sektor-pariwisata/>

⁶ Kementerian Pariwisata, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015.” Diakses dalam <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/test/LAKIP-KEMENPAR%202015>

⁷ Kementerian Pariwisata, diakses pada 27 maret 2019

⁸ ECPAT International, “Indonesia Tujuan Wisata Seks Anak (Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Harus Proaktif Mengantisipasi)”. <http://ecpatindonesia.org/berita/indonesia-tujuan-wisata-seks-anak-pelaku-usaha-jasa-pariwisata-harus-proaktif-mengantisipasi/>.

peran yang cukup besar dalam peningkatan praktek kejahatan ini.⁹ Anak-anak yang menjadi korban, harusnya mendapatkan hak berupa pendidikan yang baik dan kehidupan yang layak dari orangtuanya. Namun, dengan adanya kejahatan seperti ini mereka kehilangan hak tersebut karena berada dalam lingkaran keluarga yang berpendidikan rendah dan kemampuan keuangan yang tidak mencukupi.¹⁰ Itulah yang menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi seksual komersial anak (ESKA).

Dalam Pernyataan UNHCR¹¹ (*United Nation High Commissioner for Refugees*) pada konsultasi di Kongres Dunia di Stockholm tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, istilah kekerasan seksual mencakup semua bentuk ancaman seksual, penyerangan, gangguan dan eksploitasi.¹² Sedangkan Kongres Dunia pertama yang diadakan di Stockholm pada tahun 1996 tentang eksploitasi seksual mendefinisikan eksploitasi seksual terhadap anak-anak merupakan sebagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disertai imbalan dalam bentuk uang tunai atau sejenisnya.¹³ Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mencakupi praktek-praktek kriminal dengan merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikologi

⁹ Valentina Oki Yovita, "Kerjasama Indonesia-End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) dalam Mengatasi Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Sektor Pariwisata Indonesia", diakses pada <http://repository.upnyk.ac.id/1483/1/RESUME.pdf>

¹⁰ Valentina Oki Yovita, diakses pada 15 febuari 2019

¹¹ UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) merupakan sebuah organisasi yang berada dibawah naungan PBBF. Didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh sidang umum PBB. Fungsi organisasi ini adalah untuk mengatasi kasus-kasus yang berhubungan dengan pengungsi.

¹² Anonim, "Critical Issues: Abuse and Exploitation, "Action for the rights of the children (ARC), diakses pada www.unhcr.org/3bb81aea4.pdf

¹³ UNICEF, "What is child sexual exploitation", diakses pada https://www.unicef.org/indonesia/UNICEF_Indonesia_Sexual_Exploitation_Fact_Sheet-July_2010.pdf.

anak¹⁴, hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja.¹⁵ Kasus ESKA tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia saja tetapi juga kesadaran masyarakat itu sendiri.¹⁶

Bentuk ESKA¹⁷ yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini adalah prostitusi, perdagangan, pornografi¹⁸ dan pariwisata seks anak.¹⁹ Hasil pemantauan media yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia pada September sampai dengan November 2016, menunjukkan jumlah kasus ESKA sebanyak 24 Kasus dengan jumlah korban sebanyak 335 orang anak yang menjadi korban ESKA, dengan presentasi 55% anak perempuan dan 45% anak laki-laki. Kategori kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual sebanyak 46% dan Prostitusi anak online sebanyak 2%. Selain itu pemantauan media ini juga menjelaskan mengenai wilayah terjadinya suatu peristiwa yang kebanyakan terjadi di daerah Jawa Barat sebanyak 17% dan Jawa Timur sebanyak 12% dan 8% dari beberapa daerah lainnya diantaranya adalah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.²⁰ Namun dari beberapa kategori persoalan ESKA, persoalan prostitusi anak mendapatkan posisi teratas,

¹⁴ Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak, ECPAT International, Diterjemahkan oleh Ramlan, S.PD.I, Hal 40

¹⁵ World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, Stockholm, Sweden, 27-31 August 1996, diakses pada http://www.ecpat.net/sites/default/files/stockholm_declaration_1996.pdf

¹⁶Estu Suryowati,"Masyarakat Diminta Terlibat Cegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak", Kompas.com 1 Agustus 2017 <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/01/11205951/masyarakat-diminta-terlibat-cegah-eksploitasi-seksual-komersial-anak>

¹⁷Istilah ESKA berasal dari Commercial Sexual Exploitation of Children Hasil dari kongres di Stockholm tahun 1996. Istilah ini dipopulerkan dan dibahasa indonesiakan oleh kalangan LSM di Indonesia menjadi ESKA. Istilah ESKA ditulis dalam Jurnal "Peran ECPAT dalam Menangani CSEC oleh Wisatawan Asing" oleh Eka Mulyani Lestari, Universitas Udayana.

¹⁸ Anonim, "Critical Issues: Abuse and Exploitation, "Action for the rights of the children (ARC), diakses pada www.unhcr.org/3bb81aea4.pdf

¹⁹Heatwatch.About Commercial Sexual Exploitation of Children, diakses pada http://www.heatwatch.org/human_trafficking/aboutcsec.

²⁰ Penanganan Kasus ESKA di Indonesia, diakses pada icjr.or.id/data/wp-content/uploads/.../Final-Rumusan-ESKA-di-RKUHP-6-Agustus.

dibandingkan dengan kasus pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Lebih jauh berdasarkan data dari ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) Indonesia, awal tahun 2018 terdapat 32 kasus perdagangan anak dan eksploitasi seksual, dimana kasus tersebut didominasi oleh perdagangan anak, prostitusi anak, anak korban eksploitasi seks, dan kasus eksploitasi ekonomi. Sedangkan selama bulan Maret 2017, kasus ESKA yang berhasil terungkap, 45,5% diantaranya kasus anak yang diperdagangkan dan 18,2% merupakan kasus anak yang dilacurkan.²¹ Institut perempuan juga melaporkan bahwa sekitar 43,5% anak-anak korban trafficking masih berusia 14 tahun, walaupun sebagian besar perdagangan anak melibatkan anak-anak usia 17 tahun.²² Sebelumnya, pada tahun 2016 juga terungkap sebanyak 44,63% kasus perdagangan dan eksploitasi anak.²³ Berdasarkan hasil studi ECPAT Indonesia bersama ECPAT Internasional, terdapat lima daerah pariwisata Indonesia dengan kasus ESKA terbesar yaitu, Bali, Lombok, Batam, Jakarta dan Yogyakarta.²⁴

ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) merupakan salah satu jaringan organisasi internasional dan individu yang bekerjasama untuk

²¹ ECPAT Indonesia, “Pemantauan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Maret 2017”, diakses pada <http://ecpatindonesia.org/berita/pemantauan-kasus-eksploitasi-seksual-komersial-anak-maret-2017>

²² *Women and Children Trafficking in West Java Causing More Concern*. Diakses pada <http://indonesiahaveanews.blogspot.com/2008/04/women-and-children-trafficking-in-west.html>.

²³ Bank data perlindungan anak, “Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016”, <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

²⁴ Umi Nur Fadhilah, “Penelitian Sebut Wisata Seks Anak Semakin Meningkat” *Republika.co.id*, 22 Desember 2016 <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/22/oik6tl384-penelitian-sebut-wisata-seks-anak-semakin-meningkat>.

menghapuskan ESKA yang meliputi prostitusi anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan perdagangan anak dengan tujuan seksual.²⁵ Jaringan ECPAT sudah ada lebih dari 70 negara, salah satunya adalah Indonesia. Sebagai sebuah jaringan, ECPAT memiliki berbagai macam program untuk menentang ESKA di Indonesia.

Dalam upaya penanggulangannya, ECPAT berperan sebagai pihak pemberi bantuan luar negeri berupa bantuan teknis, bantuan dalam pengawasan program nasional, usaha-usaha advokasi dan kampanye ESKA. Dalam pelaksanaan program-programnya, ECPAT juga menjalin kerjasama baik dengan pemerintah Indonesia. Dari kerjasama inilah diharapkan praktek ESKA yang terjadi di Indonesia dapat tertangani dan mengalami penurunan.

1.2 Rumusan Masalah

Secara global, trend eksploitasi seksual komersial anak semakin hari semakin meningkat karena akses kunjungan wisata di setiap negara semakin mudah. Situasi seperti ini tidak pernah berhenti dikarenakan permintaanya semakin meningkat. Gencarnya upaya dalam menangani eksploitasi seksual komersial anak di kawasan pariwisata mengubah tujuan wisata seks anak di negara-negara Asia. Bahkan, pelaku kejahatan seks anak menjadikan Indonesia sebagai destinasi ke tiga terbesar di Asia sebagai tempat tujuan wisata seks anak. Hal tersebut dipicu karena lemahnya penanganan situasi ESKA serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia tentang situasi ini. Permasalahan ESKA tidak hanya mendapatkan perhatian dari pemerintah saja tetapi juga ECPAT Internasional yang ada di Indonesia. ECPAT merupakan salah satu NGO internasional yang peduli dan

²⁵ ECPAT Internasional, *Memerangi Pariwisata Seks Anak : Tanya & Jawab*, hal 4

mempunyai visi-misi untuk menentang ESKA dan melindungi hak-hak dasar anak dari bentuk pelecehan dan eksploitasi. Sehingga kolaborasi antara pemerintah dan ECPAT dibutuhkan untuk mengatasi kasus ESKA yang terjadi di Indonesia. Menarik untuk dikaji lebih jauh tentang upaya yang telah dilakukan ECPAT dalam mengatasi kasus ESKA di Indonesia mengingat semakin pentingnya peran aktor non negara dalam isu-isu internasional kontemporer.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi pertanyaan dari penelitian ini adalah “Bagaimana upaya ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) dalam mengatasi kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) dalam mengatasi kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Berkontribusi dan menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan Hubungan Internasional, khususnya tentang kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia
2. Sebagai referensi bagi akademisi keilmuan Hubungan Internasional dalam menelaah masalah serupa mengenai sejauh mana ECPAT berperan dalam menangani kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia.

1.6 Studi Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan karya tulis sebagai studi pustaka dari beberapa penelitian yang pernah menulis maupun meneliti isu yang sama mengenai eksploitasi seksual komersial di sektor pariwisata Indonesia.

Kajian pustaka pertama yaitu dari Swarnalatha K, yaitu “*Causes and Consequences of Child Labour: Government Initiatives*”.²⁶ Pada jurnal ini penulis menganggap bahwa kemiskinan, pengangguran, kurangnya ilmu pengetahuan serta pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya *Child Labour* di India. Selain itu, masalah *Child Labour* juga berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental anak. Dimana pekerja anak di India sangat mengkhawatirkan khususnya perempuan, dikarenakan terjadinya diskriminasi gender di sebagian besar masyarakat. Lebih dari 80% pekerja anak ditemukan di sektor pedesaan, mereka bekerja pada sektor pertanian dan rumah tangga. Sehingga untuk mengatasi kondisi ini pemerintah India dan pemerintah negara berupaya untuk menghapuskan pekerja anak perempuan di India, dengan membuat fasilitas penelitian berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia, menciptakan lingkungan dan kesehatan kerja serta mengembangkan basis data dan sistem informasi untuk memantau masalah *Child Labour*.

Perbedaan penelitian ini dengan judul yang penulis angkat yaitu, dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pekerja anak khususnya wanita mendapatkan diskriminasi gender dari sebagian masyarakat yang dapat membahayakan

²⁶ Swarnalatha K, “Causes and Consequences of Child Labour: Government Initiatives”, *International Journal of Home Science*, hal. 292

perkembangan fisik dan mental mereka. Sedangkan penelitian yang hendak penulis teliti yaitu menganalisis bagaimana peran ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) dalam mengatasi kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia.

Kedua, dalam penelitian Adni Luthfi yaitu “*Peran End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menanggulangi Kasus Child Trafficking di Albania (2007-2012)*”.²⁷ Tulisan ini membahas tentang upaya pemerintah Albania dalam mengatasi *Child Trafficking* dimana anak-anak digunakan untuk tujuan wisata seksual dengan memberikan imbalan dalam bentuk tunai maupun bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, agen atau pihak lain yang mendapatkan keuntungan. Albania di anggap sebagai negara sumber perdagangan manusia. Pekerja anak khususnya anak jalanan telah menjadi epidemi nasional di Albania. Pemerintah sudah melakukan koordinasi antara semua lembaga pemerintah di tingkat lokal maupun internasional namun masih belum berjalan baik. Sehingga untuk mengatasi kasus *Child Trafficking*, Albania bergabung dengan *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)* Internasional dan membentuk perwakilan dari ECPAT Internasional dengan nama *Albanian Coalition against Trafficking and the Sexual Exploitation of Children (ACTSEC)*.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian di atas berfokus pada *Child Trafficking* di Albania, sedangkan penelitian

²⁷ Adni Luthfi, “Peran End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menanggulangi Kasus Child Trafficking di Albania (2007-2012)”, *eJournal Hubungan Internasional*, 2015: vol. 2 no.1

yang penulis teliti berfokus secara menyeluruh dalam menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.

Studi pustaka ketiga yaitu jurnal Antoni Gabriel Liah, "*Peran ECPAT dalam Menangani Masalah Child Sex Tourism di Indonesia*".²⁸ Dalam jurnal ini, penulis membahas masalah *child sex tourism* yang terjadi di Indonesia. Bali sebagai daerah tujuan wisata bagi masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia menjadikan Bali sebagai sektor andalan dalam pariwisata. Namun disisi lain adanya praktek-praktek transaksi seksual ilegal yang terjadi Bali tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Maka dalam hal ini pemerintah Indonesia berupaya melakukan kerjasama dengan ECPAT melalui jaringan ECPAT Internasional yang ada di Indonesia yaitu Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA). Selain bekerjasama dengan pemerintah, ECPAT juga menjalin kerjasama dengan organisasi non pemerintah sebagai jaringan ECPAT maupun bukan jaringan ECPAT. Kerjasama tersebut dibagi kedalam program kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah Indonesia juga melanjutkan program kerja tersebut dengan mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Indonesia yang dijalankan pada tahun 2004-2009. Salah satu bukti tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam pencapaian program tersebut adalah dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Tenggara tentang Pariwisata Seks Anak yang diselenggarakan di Bali pada Maret 2009. Konferensi ini

²⁸ Antoni Gabriel Liah, "*Peran ECPAT dalam Menangani Masalah Child Sex Tourism (CST) di Indonesia*", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2013 : 845-856

menghasilkan komitmen dan rekomendasi terhadap eksploitasi anak di bidang pariwisata.

Perbedaanya dengan penelitian penulis adalah pada studi kasusnya, dimana dalam jurnal ini membahas peran ECPAT khususnya menangani masalah *Child Sex Tourism* di Indonesia, sedangkan peneliti membahas peran ECPAT khususnya menangani masalah ESKA di Indonesia

Keempat, jurnal dari Eka Mulyani Lestari yaitu “*Peran ECPAT dalam Menangani CSEC oleh Wisatawan Asing di Thailand*”.²⁹ Dalam jurnal ini penulis mengatakan bahwa *Commercial Sexual Exploitation of the Childrend* (CSEC) merupakan salah satu dampak negatif setelah dibukanya pariwisata di Thailand. Wisatawan asing yang datang secara sengaja menjadikan anak-anak sebagai objek seks yang bersifat komersil. CSEC oleh wisatawan asing diperburuk oleh adanya stigma Thailand sebagai negara *child sex tourism* terbesar di dunia. Sehingga masalah CSEC ini mendapatkan perhatian dari ECPAT sebagai NGO yang mana dalam visinya ECPAT berupaya mencegah dan menciptakan lingkungan anak yang bebas dari CSEC. Selain itu, dalam menjalankan perannya sebagai *agenda setter, educator* dan *counterpart*, ECPAT juga menggunakan strategi yang menyasar kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam usaha menangani CSEC oleh wisatawan. Tiga peran inilah yang menjadi fokus utama ECPAT dalam menjalankan perannya di Thailand.

Perbedaanya dengan penelitian penulis adalah pada studi kasusnya, dimana dalam jurnal ini membahas peran ECPAT khususnya menangani masalah

²⁹ Eka Mulyani Lestari, “Peran ECPAT dalam Menangani CSEC oleh Wisatawan Asing di Thailand”. *eJuournal Hubungan Internasional*, 2015: vol.1 no.03

Commercial Sexual Exploitation of the Children (CSEC) wisatawan asing di Thailand, sedangkan peneliti membahas peran ECPAT khususnya menangani masalah ESKA di Indonesia

Studi pustaka terakhir yang penulis gunakan yaitu jurnal dari Amanda Riri Rizki, “Kontribusi ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking) Terhadap Aktivitas Sex Tourism di Brazil Tahun (2012-2014)”.³⁰ Dalam jurnal ini penulis membahas tentang pariwisata seks anak yang terjadi di Brazil. Bertepatan dengan kebangkitan pariwisata Brazil sebagai mesin propaganda besar memulai mempromosikan Brazil di luar negeri dan seringkali menggunakan eksploitasi dari produk lokal, “Brazil Mulata”. Meskipun pemerintah Brazil telah secara radikal mengubah strategi iklannya, pariwisata seks masih merupakan masalah padalokasi wisata Brazil. Tidak hanya itu saja, aktivitas seks di disektor pariwisata di Brazil juga mengalami lonjakan yang dapat dilihat ketika diselenggarakannya piala dunia 2014. Berbagai aksi yang telah dilakukan dalam industri pariwisata yaitu melakukan kerjasama ECPAT, UNWTO, dengan LSM lokal untuk menentang *sex tourism* dapat dibagi dalam dua langkah: pertama, langkah-langkah yang dikembangkan di negara-negara pengiriman wisatawan dan kedua, langkah-langkah yang dilakukan di negara-negara penerima wisatawan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempromosikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

Perbedaanya dengan penelitian penulis adalah pada studi kasusnya, dimana dalam jurnal ini membahas kontribusi ECPAT khususnya menangani masalah *sex*

³⁰ Amanda Riri Rizki, “Kontribusi ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking) Terhadap Aktivitas Sex Tourism di Brazil Tahun (2012-2014)”. *Universitas Riau*, (2015), vol.2 no.1

tourism di Brazil sedangkan peneliti membahas peran ECPAT khususnya menangani masalah ESKA di Indonesia.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *International Non-Governmental Organization (INGO)*

Dalam hubungan internasional, negara memiliki peran penting dan merupakan aktor utama. Namun karena adanya perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional, menyebabkan negara bukan lagi merupakan aktor utama melainkan ada aktor non negara seperti *Non-government organization* (NGO) yang memiliki peran penting dan berpengaruh dalam politik dunia.³¹

Non-government organization (NGO) merupakan aktor transnasional maupun internasional yang melintasi batas-batas nasional yang terdiri dari individu atau kelompok dan bukan perwakilan dari pemerintah. NGO bertujuan untuk melayani kepentingan sosial yang fokus pada advokasi atau usaha operasional pada tujuan sosial, politik dan ekonomi, termasuk kesetaraan, pendidikan, kesehatan, penyelamatan lingkungan dan hak asasi manusia. Selain itu, NGO juga tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dalam sistem masyarakatnya.³²

Istilah NGO digunakan sejak berdirinya PBB pada tahun 1945 yang digunakan untuk membedakan antara hak partisipasi antara badan-badan pemerintah³³ dan telah di akui dalam pasal 71 piagam PBB.³⁴ Selain itu NGO juga

³¹ Jessica T. Mathews, "Power Shift," *Foreign Affairs* 76 (January/February 1997), p. 50.

³² Teegan, H., Doh, J. and Vachani, S. (2004), "The importance of non governmental Organizations (NGOs) in global governance and value creation: an international business research agenda", *Journal of International Business Studies*, Vol. 35 No. 6, pp. 463-83

³³ Gerard Clark, *The Politics of NGOs in South-East Asia: Participation and Protest in the Philippines*, p.4.

mengacu pada organisasi yang ada di negara maju maupun negara berkembang. Secara umum, NGO didefinisikan sebagai organisasi swasta, sukarela, nirlaba, mandiri dan profesional yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut P.J Simmons, ada empat cara yang dilakukan NGO dalam mempengaruhi pemerintah nasional, lembaga multilateral, perusahaan nasional dan multinasional, yaitu *setting agendas*, *negotiating outcomes*, *conferring legitimacy*, and *making solution work*.³⁵ Fungsi NGO yang pertama yaitu *setting agendas*, merupakan salah satu upaya yang dilakukan NGO untuk memainkan perannya dalam memaksa para pemimpin dan pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan suatu isu. Kedua, *negotiating outcomes*, NGO dapat bertindak sebagai ‘ahli’ dalam suatu isu. Ketiga, *conferring legitimacy* yaitu kinerja NGO dapat menarik kepercayaan publik. Keempat, *making solution work* yaitu NGO dikenal dapat menerapkan solusi karena statusnya yang netral dan efektif. Selain itu INGO juga dapat melakukan apa yang pemerintah tidak bisa lakukan

Ada beberapa paradigma yang menjelaskan pentingnya NGO dalam hubungan internasional, salah satunya paradigma transnasionalisme yang dapat menggambarkan munculnya peran NGO dalam hubungan internasional. Dalam pandangan transnasional, aktor non negara (terutama NGO) merupakan aktor yang dianggap penting. Paradigma ini dihasilkan dari ketidakpuasan masyarakat, sehingga pemerintah harus bertindak dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan

³⁴ Article 71 reads “The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned.”

³⁵ P.J. Simmons, “Learning to Live with NGOs,” p. 84.

masyarakat. Pandangan ini secara ekstensif telah dijelaskan oleh pandangan liberal yang melihat dunia berdasarkan hubungan transnasional daripada hubungan internasional. Untuk memahami perbedaan liberal dan realis dalam melihat politik internasional melalui pandangan transnasional.³⁶

Dalam paradigma transnasional, NGO beroperasi di tingkat internasional dengan pemerintah dan IGO. Mereka berkontribusi luas dalam dunia politik. Rosenau berpikir bahwa studi tentang hubungan transnasional fokus pada interaksi antara aktor non-pemerintah serta hubungan antar negara. Singkatnya, jaringan transnasional menjadi lebih penting dan lebih kompleks dengan melibatkan pemerintah dan NGO yang secara independen berusaha untuk mencapai tujuan.

Untuk menganalisa peran NGO dalam hubungan internasional bisa dilakukan dengan empat cara yaitu,

1. *Organizational dimensions*: dimensi ini mencakup dua aspek yaitu keberadaan dan operasi dari NGO.³⁷ Pada dimensi ini kita dapat memahami rentang geografis, basis dukungan, keanggotaan, informasi keuangan dan status hukum sebuah NGO.
2. *Governance dimensions*: pada dimensi ini berisi informasi tentang instrumen dari kebijakan pemerintah dan program administrasi apa NGO berhubungan

³⁶ Bruce Russett, Harvey Starr, and David Kinsella, *World Politics: The Menu for Choice*, 6th ed. (New York: Bedford/St. Martin's, 2000), pp. 400-1.

³⁷ Thomas G. Weiss and Leon Gordenker, "Pluralizing Global Governance: Analytical Approaches and Dimensions," in Thomas G. Weiss and Leon Gordenker eds., *NGOs, the UN, and Global Governance* (London: Lynne Rienner Publishers, 1996), pp.41-3.

3. *Strategic dimensions*: dimensi ini menetapkan apa saja yang ingin dicapai oleh NGO
4. *Output dimensions*: dimensi ini dibentuk untuk membuktikan hasil dari kegiatan NGO dalam kerangka sistem PBB.³⁸

Melalui empat dimensi ini, dapat digunakan untuk menjelaskan peran ECPAT dalam mengatasi kasus ESKA di Indonesia. Pada *organizational dimensions* dan *governance dimensions* tidak hanya menggambarkan situasi ESKA yang terjadi di Indonesia tetapi juga kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai ECPAT. Selain itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah dan dengan lembaga apa ECPAT bekerjasama dapat dilihat pada dimensi ini. Sedangkan *strategic dimensions* dan *output dimension* lebih kepada cara dan hasil yang sudah dicapai oleh ECPAT dalam mengatasi kasus ESKA di Indonesia.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian kualitatif dijabarkan oleh John Creswell sebagai sebuah penelitian yang mengeksplorasi permasalahan manusia dan sosial, dimana peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan menyeluruh,

³⁸ Thomas G. Weiss and Leon Gordenker, "Pluralizing Global Governance: Analytical Approaches and Dimensions," in Thomas G. Weiss and Leon Gordenker eds., *NGOs, the UN, and Global Governance* (London: Lynne Rienner Publishers, 1996), pp.43.

menganalisis kata-kata, membuat laporan secara detail.³⁹ Metode kualitatif deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa.⁴⁰

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini, peneliti mengambil rentang waktu dari tahun 2016 hingga 2018. Tahun 2016 merupakan tahun dimana kasus-kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia meningkat. Sepanjang tahun 2016-2018 ECPAT terus berupaya melakukan penanganan dan pendampingan terhadap kasus ESKA di Indonesia

1.8.3 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi

Menurut Mochtar Mas'ood, unit analisis adalah unit yang perilakunya akan diteliti atau yang dikenal dengan variabel dependen.⁴¹ Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang dapat mempengaruhi perilaku variabel dependen atau unit analisis atau disebut juga dengan variabel independen.⁴² Berdasarkan pemaparan diatas, maka unit analisa dalam penelitian ini adalah ECPAT, unit eksplanasinya adalah ESKA di Indonesia. Sedangkan level analisa adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Sesuai dengan konteks penelitian ini, maka level analisa dari penelitian ini adalah Negara Indonesia

³⁹ John W. Creswell, *Quantitative, Quantitative and Mixed methods Approaches. Third Editions*, Sage publications, California, 2009, 4

⁴⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana

⁴¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Jogjakarta: Pusat Antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES).

⁴² Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Jogjakarta: Pusat Antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES)

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber. Yaitu penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, serta artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Mengingat banyaknya sumber informasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan ini penulis kemudian akan memilih kembali sumber-sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Tahap awal yang peneliti lakukan dalam proses pengolahan data ialah menyeleksi dan mengumpulkan data terkait persoalan yang diangkat dalam penelitian, kemudian melakukan pengolahan data dan menginterpretasi data tersebut dengan menggunakan konsep *International Non-Governmental Organization (INGO)* dalam menjawab permasalahan atau objek penelitian. Untuk memudahkan penulis melakukan pengolahan data, maka penulis mencoba mengelompokkan data-data sekunder yang diperoleh melalui tulisan-tulisan terkait baik itu dari surat kabar (koran), majalah, dan dalam bentuk dokumen lainnya seperti dari situs resmi ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia, data dari KPAI, dan beberapa jurnal.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Membahas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, teori, kajian pustaka, serta metodologi yang digunakan pada penelitian yang ingin dilakukan serta sistematika penulisan selanjutnya.

BAB II : Pada bab ini, peneliti menjelaskan kondisi, faktor dan dampak ESKA serta upaya pemerintah dalam mengatasi ESKA

BAB III : Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia

BAB IV : Pada bab ini, penulis menjelaskan upaya ECPAT dalam mengatasi kasus ESKA di Indonesia

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran

